

BAB IV

TANTANGAN DAN MASALAH SERTA PROSPEK APBD 2005

A. Tantangan dan Masalah

Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara dan pusat pemerintahan terus berupaya melakukan perbaikan di berbagai aspek kehidupan. Hal tersebut ditandai dengan berlangsungnya proses perubahan ke arah perbaikan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat, yang ditunjukkan oleh berbagai perubahan indikator sosial-ekonomi yang lebih positif. Namun demikian, tantangan yang dihadapi juga akan semakin kompleks dalam waktu-waktu mendatang. Di lain pihak terbentuknya kabinet baru, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil Pemilu 2004 diharapkan dapat memberi nuansa baru yang lebih harmonis dan produktif.

Tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah terkait dengan bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban kota yang belum memadai dan bersifat kompleks dibanding persoalan yang sama di wilayah non-perkotaan. Dengan kondisi keamanan dan stabilitas yang memadai, dipercaya akan mampu menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi aktivitas di bidang ekonomi, investasi, serta kehidupan sosial dan kemasyarakatan.

Tantangan dan masalah di bidang pemerintahan yang terus mendapat sorotan masyarakat adalah pemerintahan yang bersih, penegakan hukum, peningkatan kualitas pelayanan masyarakat (misalnya sistem pelayanan satu atap yang telah diterapkan), serta pendelegasian wewenang yang makin besar kepada pemerintahan di wilayah administrasi yang lebih rendah sampai di tingkat Kelurahan khususnya dalam hal kebersihan dan ketertiban umum. Disamping itu perlu juga dievaluasi terus menerus pelaksanaan otonomi daerah, upaya peningkatan PAD serta profesionalisme pengelolaan keuangan dan aset daerah. Semua itu adalah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tantangan dan masalah di bidang ekonomi yang harus menjadi perhatian adalah mulai dilaksanakannya pasar bebas ASEAN (AFTA 2003) serta pengaruh globalisasi secara umum, pemulihan perekonomian daerah, peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pembinaan dan penertiban pedagang kaki lima, peningkatan kemampuan usaha kecil, menengah dan koperasi serta pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Pada kenyataannya ekonomi belum tumbuh sesuai dengan harapan. Dalam tahun 2000-2003 perekonomian tumbuh rata-rata 4 persen, jauh lebih rendah dari masa sebelum krisis yang mampu tumbuh rata-rata 8 persen per tahun. Permasalahan pokok di bidang ekonomi adalah kurangnya permodalan bagi usaha kecil dan menengah, rendahnya minat investasi baik dari dalam maupun luar negeri, serta masalah angkatan kerja yang semakin meningkat jumlahnya.

Selain itu tantangan di sektor pariwisata adalah pengembangan kepariwisataan yang mengarah kepada terwujudnya masyarakat sadar wisata, kualitas dan daya saing industri pariwisata sebagai andalan perekonomian.

Selanjutnya tantangan di bidang perekonomian antara lain kurang gairahnya para manajer terhadap pengembangan usaha daerah, UKM dan koperasi, lemahnya minat berinvestasi PMA/PMDN yang sampai saat ini masih belum signifikan mendukung perekonomian daerah.

Sementara itu tantangan dan masalah yang dihadapi di bidang sosial adalah peningkatan kualitas pendidikan serta biaya pendidikan yang dapat terjangkau oleh penduduk tidak mampu, pengurangan penduduk miskin, peningkatan kualitas pemuda sebagai generasi penerus, peningkatan kesehatan masyarakat terutama di pemukiman kumuh dan Kepulauan Seribu serta pengendalian tuna wisma dan pengemis yang semakin meningkat jumlahnya. Di bidang ketenagakerjaan tantangan yang dihadapi adalah peran dan efektivitas Balai Latihan Kerja Daerah dalam menghasilkan tenaga-tenaga terlatih siap pakai.

Di sisi lain, tantangan yang dihadapi adalah bertambahnya jumlah penduduk akibat arus urbanisasi ke Jakarta, angkatan kerja yang semakin meningkat akibat PHK maupun putus sekolah.

Selanjutnya tantangan dan masalah di bidang sarana dan prasarana adalah berkaitan dengan penataan ruang, penyediaan transportasi publik yang terjangkau dan memadai, penanggulangan masalah sampah dan banjir yang selalu muncul setiap tahun, pengendalian polusi udara akibat kendaraan bermotor, penyediaan rumah murah bagi penduduk, serta penataan pulau-pulau padat di Kepulauan Seribu.

Tantangan dan masalah di bidang pengawasan adalah masih lemahnya sistem audit di lingkungan pemerintahan daerah, kurangnya transparansi publik, dan belum memadainya tenaga profesional dibidang pengawasan. Di sisi lain, perjuangan meneruskan reformasi termasuk pemahaman terhadap reformasi itu sendiri masih berjalan lambat dan belum memenuhi harapan masyarakat.

Semua tantangan dan permasalahan yang diuraikan di atas merupakan tugas berat Pemprov DKI Jakarta, untuk bersama dunia usaha dan masyarakat luas dapat mulai mengatasi dan menyelesaikannya. Untuk itulah Pemprov DKI Jakarta sepatutnya memberikan penjelasan kepada berbagai pihak tentang program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2005, agar masyarakat luas mengetahui dan ikut memberikan komitmennya.

B. DKI Jakarta Dalam Perspektif Nasional

Permasalahan DKI Jakarta pada prinsipnya berakar dari tuntutan yang begitu besar atas peran dan fungsi kota Jakarta yang harus dijalankan, baik dalam lingkup nasional maupun daerah. Peran Propinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara dan fungsi Propinsi DKI Jakarta sebagai Kota Jasa (*Service City*) mendorong Pemerintah Daerah untuk sejauh mungkin menggunakan dan mengoptimalkan segala sumber daya yang ada dan kemampuan APBDnya.

1. Peran Propinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara

Jakarta sebagai ibukota negara, pusat pemerintahan dan kota internasional dalam perkembangannya memikul beban yang cukup besar. Untuk menampilkan citra bangsa dan negara yang baik bagi dunia luar, serta sebagai tempat kedudukan hampir keseluruhan perangkat pemerintahan di tingkat nasional, perwakilan negara-negara asing, pusat-pusat perusahaan multi-nasional, dan gerbang utama wisatawan manca negara, Jakarta dituntut terus berbenah diri. Sarana dan prasarana yang belum memadai, daya dukung lingkungan yang makin terbatas, serta kemajuan dan kemajemukan masyarakat metropolitan menjadi ciri umum permasalahan pembangunan yang dihadapi. Selama ini, arah kebijakan pembangunan yang ditempuh pemerintah daerah selalu berorientasi pada 2 hal pokok yakni:

1. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung berbagai aktivitas ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.
2. Mempercepat pemulihan ekonomi untuk segera dapat mengatasi dan mengantisipasi berbagai masalah perekonomian daerah yang dihadapi.

Akan tetapi kemakmuran yang dicapai diatas pondasi masalah yang masih besar seringkali akan menimbulkan permasalahan baru, terlebih dalam masa pemulihan pasca krisis sekarang ini. Masalah dimaksud adalah belum memadai dan masih rentannya keamanan, ketentraman dan ketertiban kota serta rasa keadilan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat Jakarta. Dilain pihak, masalah keamanan ibukota bukan semata menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah saja melainkan juga perlu perhatian dari Pemerintah Pusat melalui tugas-tugas Kepolisian dan TNI. Masalah lainnya adalah urbanisasi yang masih besar dan sulit dibendung, yang mendorong terjadinya ketidaknyamanan kehidupan di Jakarta, menjadi suatu fenomena tersendiri. Masalah urbanisasi tidak selayaknya hanya menjadi beban Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebagai daerah tujuan, namun juga tanggung jawab Pemda lainnya terutama bagi daerah yang selama ini potensial sebagai daerah asal urban, antara lain dengan mengupayakan tumbuhnya lapangan

pekerjaan lokal bagi penduduknya. Tanggung jawab Pemerintah Pusat diperlukan untuk dapat menciptakan pemerataan pembangunan antar daerah melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah.

2. Fungsi Propinsi DKI Jakarta sebagai Kota Jasa (*Service City*)

Untuk mendukung fungsi DKI Jakarta sebagai Kota Jasa (*Service City*), pembangunan yang dilakukan harus dapat mendukung fungsi-fungsi pelayanan kota baik untuk kepentingan lokal, nasional maupun internasional. Penjabaran sebagai Kota Jasa (*service city*) adalah menjadikan DKI Jakarta sebagai:

1. Pusat Informasi dan Pelayanan Masyarakat
2. Pusat Perdagangan dan Distribusi
3. Pusat Keuangan
4. Pusat Kebudayaan dan Pariwisata
5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Pemenuhan keseluruhan fungsi tersebut memerlukan upaya pembangunan yang sangat besar, dan tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu kerjasama dan keterlibatan Pemerintah Pusat, Sektor Swasta dan Masyarakat dalam suatu kerangka perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan sinergis sangat diperlukan untuk segera dapat mewujudkan fungsi Kota Jasa dimaksud.

C. Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun 2004

Pelaksanaan APBD Propinsi DKI Jakarta tahun 2004 dilakukan mengikuti sistem baru pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku sejak tahun 2003, yang mengacu pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, PP 105 Tahun 2000 serta Perda 8 Tahun 2001. Perubahan ini mencakup pembagian struktur keuangan daerah yang sebelumnya dikenal dengan belanja rutin dan pembangunan (*dual budgeting*) menjadi belanja periodik dan aktifitas pada tahun 2003, serta belanja tetap dan tidak tetap pada tahun 2004 berbasis

kinerja. Sistem pengelolaan keuangan ini menganut sistem satu kesatuan dalam Mata Anggaran (*Unified Budgeting*), dimana sebelum tahun 2003 disebut sebagai DUPDA/DIPDA terpisah dengan DUKDA/DIKDA (*Dual Budgeting*)

Dengan diberlakukannya sistem pengelolaan keuangan daerah yang baru, disadari memunculkan sejumlah kendala yang dihadapi oleh hampir semua Unit Kerja Perangkat Daerah dalam proses penyusunan dan pengadministrasian anggaran. Berdasarkan kondisi di atas, realisasi pelaksanaan APBD terutama dari sisi belanja belum sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan. Dari sisi pendapatan, realisasi APBD tahun 2003 sampai dengan bulan Desember mencapai 107,37 persen, yang berarti 7,37 persen diatas APBD 2003 (perubahan). Sementara realisasi Pendapatan tahun 2004 sampai dengan Triwulan III 2004 mencapai 78,37 persen. Di sisi belanja, penyerapan (realisasi) APBD 2003 sampai dengan bulan Desember hanya mencapai 92,08 persen, dan penyerapan belanja APBD 2004 sampai dengan 31 September 2004 baru mencapai 51,03 persen.

1. Realisasi Penerimaan Daerah Propinsi DKI Jakarta Menurut Komponen Penerimaan

Untuk tahun 2004 sampai dengan Triwulan III (Januari-September 2004), pendapatan daerah mencapai Rp 8.630,01 milyar (delapan triliun enam ratus tiga puluh milyar sepuluh juta rupiah) atau 78,37 persen dari target pendapatan (angka perubahan) sebesar Rp 11.012,31 milyar (sebelas triliun dua belas milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) (Tabel 4.1.). Pencapaian terbesar dibanding target, diperoleh dari Dana Alokasi Umum yang merupakan komponen dari Dana Perimbangan, sebesar 103,57 persen, diikuti lain-lain PAD 99,41 persen. Komponen PAD lainnya yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan milik daerah masing-masing baru mencapai realisasi 76,92 persen, 64,85 persen dan 80,08 persen. Sedangkan total PAD sendiri mencapai Rp 4.757,83 milyar (empat triliun tujuh ratus lima puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) atau 77,56 persen dari target yang ditetapkan.

Sementara itu untuk dana perimbangan mencapai 82,15 persen, yang diperoleh dari bagi hasil pajak/bukan pajak (77,98 persen) dan dana alokasi umum (103,57 persen), masing-masing terhadap target. Komponen Pendapatan Daerah Lainnya yaitu Lain-Lain Pendapatan yang sah baru mencapai 5,72 persen.

Tabel 4.1. Realisasi Penerimaan Daerah Propinsi DKI Jakarta Menurut
Komponen Penerimaan, Januari – September 2004 (Milyar Rp)

SUMBER PENDAPATAN	APBD 2004 (Perubahan)	REALISASI	(3):(2) (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapat Asli Daerah (PAD)	6.134,56	4.757,83	77,56
Pajak Daerah	5.286,03	4.066,17	76,92
Retribusi Daerah	382,10	247,79	64,85
Hasil Perusahaan Milik Daerah	102,43	82,03	80,08
Lain-lain Pendapatan	364,00	361,84	99,41
Dana Perimbangan	4.701,01	3.862,08	82,15
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	3.934,61	3.068,31	77,98
Dana Alokasi Umum	766,40	793,77	103,57
Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan yang sah	176,74	10,10	5,72
Penerimaan Daerah	11.012,31	8.630,01	78,37

2. Realisasi Penyerapan Belanja Daerah, Propinsi DKI Jakarta

Realisasi penyerapan belanja untuk Triwulan III tahun 2004 (Januari-September 2004) baru mencapai 51,03 persen dari total anggaran Rp 12.631,05 milyar (dua belas triliun enam ratus tiga puluh satu milyar lima puluh juta rupiah). Bila patokan untuk satu triwulan adalah 25 persen, maka realisasi diatas masih terlalu rendah. Namun demikian berdasarkan pengalaman, penyerapan anggaran pada bulan-bulan pertama biasanya memang masih rendah, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat lapangan.

3. Realisasi Penyerapan Belanja Daerah Menurut Bidang Pembangunan

Realisasi penyerapan Januari-September 2004 mencapai Rp 6.445,60 milyar (enam triliun empat ratus empat puluh lima milyar enam ratus juta rupiah) atau 51,03 persen dari total anggaran Rp 12.631,05 milyar (dua belas triliun enam ratus tiga puluh satu milyar lima puluh juta rupiah). Menurut bidang, alokasi anggaran terbesar adalah untuk pemerintahan sebesar Rp. 5.548,54 milyar (lima triliun lima ratus empat puluh delapan milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) diikuti oleh bidang sarana dan prasarana kota sebesar Rp. 2.662,95 milyar (dua triliun enam ratus enam puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Realisasi penyerapan belanja dari kedua bidang tersebut masing-masing sebesar 53,59 persen dan 36,59 persen. (Tabel 4.2.)

Tabel 4.2. REALISASI PENYERAPAN BELANJA DAERAH
MENURUT BIDANG PEMBANGUNAN
Januari - September 2004 (Milyar Rp)

No.	BIDANG PEMBANGUNAN	JAN-SEP 2004		
		PENETAPAN	REALISASI	(Persen)
1.	Hukum, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kesatuan Bangsa	545,45	326,01	59,77
2.	Pemerintah	5.548,54	2.973,21	53,59
3.	Ekonomi	457,77	262,32	57,30
4.	Pendidikan dan Kesehatan	1.783,29	905,67	50,79
5.	Kependudukan dan Ketenagakerjaan	166,29	110,23	66,29
6.	Sosial Budaya	810,39	541,36	66,80
7.	Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	656,37	352,53	53,71
8.	Sarana dan Prasarana Kota	2.662,95	974,27	36,59
JUMLAH		12.631,05	6.445,60	51,03

Bila dilihat dari persentase penyerapannya, persentase tertinggi untuk tahun 2004 dicapai oleh bidang sosial dan budaya sebesar 66,80 persen diikuti bidang kependudukan dan ketenagakerjaan sebesar 66,29 persen. Sedangkan yang terendah adalah bidang sarana dan prasarana kota sebesar 36,59 persen.

D. Prospek APBD Tahun 2005

Kinerja perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2005 diharapkan akan masuk pada tahap pemantapan (*stabilization stage*) sesuai dengan tahapan pembangunan yang tercantum dalam dokumen Propeda DKI Jakarta 2002-2007 dan Renstrada DKI Jakarta 2002-2007. Pertumbuhan ekonomi tahun 2005 diperkirakan mencapai 5,20 persen, dengan PDRB riil (atas dasar harga konstan 1993) diperkirakan Rp 73,97 triliun (tujuh puluh tiga triliun sembilan ratus tujuh puluh milyar rupiah). PDRB tersebut telah lebih tinggi dari keadaan sebelum krisis ekonomi (tahun 1997) sebesar Rp 69,54 triliun (enam puluh sembilan triliun lima ratus empat puluh milyar rupiah) yang menunjukkan masa krisis ekonomi sudah dapat dilampaui. Pada tahun 2004 perekonomian masih berada pada tahap pemulihan dengan pertumbuhan ekonomi 4,70 persen namun dengan didukung situasi sosial politik dan ketertiban umum yang terkendali dan kondusif; maka perekonomian akan mencapai tahap pemantapan dengan kinerja ekonomi yang lebih baik pada tahun 2005 ini.

Disamping itu, hal lain yang harus diperhitungkan dalam melihat prospek APBD tahun 2005 adalah kondisi eksternal, yang selama ini diyakini memberi pengaruh pada dinamika pembangunan di DKI Jakarta, antara lain: (a) sumber pembiayaan kegiatan pembangunan yang berasal dari APBN akan semakin terbatas, disamping karena sebagian sudah dilimpahkan ke daerah dalam bentuk dana alokasi juga karena penggunaannya akan lebih difokuskan pada pengembalian utang luar negeri dan pembayaran subsidi BBM, lebih-lebih dengan keluarnya Indonesia dari program IMF pada akhir tahun 2003 serta naiknya harga minyak dunia dalam bulan-bulan terakhir, (b) tabungan masyarakat DKI Jakarta yang walaupun sudah ada peningkatan namun belum menunjukkan angka yang berarti dan masih terbatas karena dampak krisis ekonomi berkepanjangan sebelumnya, (c) dunia usaha masih menghadapi banyak ketidakpastian serta kebijakan pemerintah yang belum terarah yang berakibat pada minat investasi yang masih rendah.

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, peran dari masing-masing Pemerintah Daerah menjadi semakin penting dan strategis. Begitu pula halnya

dengan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, dimana Pemerintah propinsi diharapkan dapat mengambil peran dan tanggung jawab lebih besar dalam memperbaiki dan mensejahterakan masyarakatnya. Untuk menjalankan peran dan fungsi tersebut tentu diperlukan dana dan biaya yang cukup besar. Besaran APBD DKI Jakarta dalam tiga tahun terakhir memang meningkat sangat berarti, dari Rp 10,92 triliun (sepuluh triliun sembilan ratus dua puluh milyar rupiah) tahun 2002, menjadi Rp 11,56 triliun (sebelas triliun lima ratus enam puluh milyar rupiah) tahun 2003 dan Rp 12,26 triliun (dua belas triliun dua ratus enam puluh milyar rupiah) tahun 2004, sedangkan untuk tahun 2005 diperkirakan akan mencapai Rp 13,93 triliun (tiga belas triliun sembilan ratus tiga puluh milyar rupiah). Peningkatan APBD ini telah memberi peluang sangat besar bagi meningkatnya investasi Pemerintah DKI Jakarta, yang diharapkan dapat lebih mampu mendorong investasi masyarakat dan dunia usaha. Peranan investasi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada tahun 2001 dan 2002 mencapai 7,90 dan 10,18 persen dari total investasi, tahun 2003 meningkat menjadi 10,75 persen, kemudian tahun 2004 turun menjadi 9,93 persen dan tahun 2005 diperkirakan menjadi 10,14 persen. Untuk tahun-tahun selanjutnya walaupun angka APBD terus meningkat, peranan investasi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta diproyeksikan kembali mendekati 6 persen seiring dengan pulihnya kemampuan investasi sektor swasta dan masyarakat.

Dari uraian diatas, jelas bahwa peranan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam investasi dan pembangunan melalui kemampuan APBD-nya meningkat secara nyata pada situasi krisis dan beberapa tahun setelah krisis. Namun peningkatan ini tidak akan ada artinya bila tidak dibarengi dengan kemampuan untuk mengelola dana APBD secara lebih efektif dan efisien. Diharapkan dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, kinerja APBD Propinsi DKI Jakarta tahun 2005 baik dari sisi pendapatan maupun belanja akan semakin terarah, transparan, akuntabel dan secara nyata dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Seperti telah dinyatakan dimuka, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 2005 diharapkan akan tetap positif sebagaimana pertumbuhan dua tahun sebelumnya. Sebelum krisis ekonomi, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta mencapai rata-rata 8 persen per tahun, namun pada saat krisis mengalami perlambatan, dan puncaknya terjadi pada tahun 1998 dan 1999, dimana pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar minus 17,6 persen dan minus 0,29 persen. Kinerja ekonomi mulai menunjukkan pertumbuhan positif 4,33 persen pada tahun 2000, 3,64 persen pada tahun 2001 dan 3,99 persen tahun 2002. Pada tahun 2003 pertumbuhan ekonomi meningkat cukup baik menjadi 4,39 persen dan diharapkan untuk tahun 2005 tetap akan tercapai pertumbuhan positif lebih dari 5 persen, dengan asumsi bahwa stabilitas politik, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat dalam kondisi yang lebih baik dalam mendukung berbagai aktivitas ekonomi di Jakarta.

Inflasi diharapkan tetap dapat ditekan di bawah 2 digit pada tahun 2005, atau berkisar pada angka 6,00 persen. Seperti telah diketahui, pada tahun 1998 telah terjadi hiper-inflasi sebesar 74,4 persen, walaupun kemudian dapat ditekan menjadi sebesar 1,8 persen pada tahun 1999. Sedangkan untuk tahun 2000 inflasi mencapai 10,29 persen, tahun 2001 mencapai 11,62 persen, dan tahun 2002 mencapai 9,08 persen, sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari karena kebijakan nasional menaikkan harga BBM dan tarif listrik untuk mengurangi subsidi, serta merosotnya nilai tukar rupiah. Namun demikian pada tahun 2003 angka inflasi dapat ditekan menjadi 5,78 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi positif, diharapkan angka pengangguran dapat ditekan di bawah 10 persen (tahun 1999 pernah mencapai angka tertinggi sebesar 13,2 persen). Walaupun beberapa indikator menunjukkan upaya pengurangan angka pengangguran yang ditandai dengan mulai pulihnya kegiatan dunia usaha namun angka pengangguran tetap masih tinggi. Sektor industri, perdagangan dan jasa, sebagai pilar utama perekonomian DKI Jakarta diharapkan mampu menyerap sebagian besar angkatan kerja baru di DKI Jakarta, karena pada kenyataannya tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi, yaitu masing-masing sebesar 14,86 persen dan 11,76 persen untuk tahun 2003 dan 2004, serta diperkirakan masih mencapai 11,96 persen tahun 2005.

Di bidang sosial kemasyarakatan, diharapkan kualitas kehidupan akan meningkat di tahun 2005. Jumlah penduduk miskin diperkirakan berkurang menjadi 3,23 persen terhadap jumlah penduduk, angka kematian bayi (IMR) menurun menjadi sekitar 17 per 1000 kelahiran, angka harapan hidup meningkat menjadi sekitar 73,4 tahun, angka partisipasi sekolah SD mendekati 100 persen, angka partisipasi SLTP sekitar 92,5 persen dan partisipasi SLTA diatas 72,4 persen.

Dibidang lingkungan hidup, masih terjadi kecenderungan-kecenderungan yang kurang menggembirakan. Penataan ruang terus mendapat tekanan dengan semakin berkembangnya kebutuhan ruang untuk pemukiman dan aktivitas bisnis, dan mengancam penyediaan ruang publik. Luas lahan untuk pemukiman terus meningkat dari 62,5 persen tahun 2000 menjadi 66,6 persen tahun 2003, demikian juga untuk perkantoran/pergudangan meningkat dari 10,3 persen menjadi 11,1 persen. Sebaliknya untuk taman kota menurun persentasenya dari 2,0 persen menjadi 1,2 persen. Selanjutnya jumlah kendaraan bermotor di Jakarta terus berkembang dengan peningkatan yang signifikan dari 3,01 juta unit tahun 2000 menjadi 5,51 juta unit tahun 2003 yang menyebabkan semakin kurang memadainya prasarana jalan yang tersedia dan semrawutnya lalu lintas jalan raya.

Selanjutnya APBD Propinsi DKI Jakarta untuk tahun 2005 diperkirakan akan berada di atas APBD Tahun 2004 yaitu mencapai Rp 13,93 triliun (tiga belas triliun sembilan ratus tiga puluh milyar rupiah). Peningkatan APBD ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kinerja perekonomian akan jauh lebih baik, yang memberi optimisme bagi tercapainya penerimaan daerah baik dari pajak dan retribusi maupun penerimaan non pajak. Di lain pihak kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka otonomi daerah yang terus diperbaiki akan memberi sinyal positif pada penguatan struktur keuangan daerah, terutama yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan kebijakan pengeluaran anggaran yang lebih efisien dan efektif, serta berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas publik maka peningkatan penerimaan daerah akan memberi dampak stimulus lebih besar dalam peningkatan pelayanan masyarakat, pemulihan ekonomi, serta rehabilitasi prasarana dan sarana kota.